

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan masih maraknya temuan maupun laporan terkait pelanggaran Pemilu. Salah satunya terjadi pada Pemilu 2024 di Kota Tasikmalaya, dengan dua diantaranya termasuk ke dalam pelanggaran kode etik dan pelanggaran netralitas ASN. Maka dari itu diperlukan partisipasi dari berbagai elemen dalam memaksimalkan kualitas penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 tersebut melalui program P2P.

Penelitian ini bertujuan menganalisis program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) yang diselenggarakan Bawaslu Kota Tasikmalaya menjelang Pilkada 2024. Program ini bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada, dengan melibatkan berbagai kalangan seperti mahasiswa dan organisasi masyarakat. Selama pelatihan intensif tiga hari, peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan pengawasan. Penelitian ini menggunakan teori sosialisasi politik dan partisipasi politik, dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi dokumentasi. Data diperoleh dari Bawaslu Provinsi dan Kota Tasikmalaya, alumni P2P, partai politik, serta masyarakat Kota Tasikmalaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) oleh Bawaslu Kota Tasikmalaya telah meningkatkan pemahaman peserta mengenai pengawasan pemilu, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif. Secara umum, peserta memahami materi dan menunjukkan kesadaran politik yang lebih baik, tetapi keterlibatan aktif dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran masih rendah. Dimana Kendala utama terletak pada kurangnya tindak lanjut pasca-pelatihan, sehingga dampak program belum berkelanjutan.

Kata kunci: Pendidikan Politik dan Bawaslu

ABSTRACT

This research is motivated by the increasing number of findings and reports related to election violations. One of them occurred in the 2024 elections in Tasikmalaya City, with two of them including violations of the code of ethics and violations of ASN neutrality. Therefore, participation from various elements is needed in maximizing the quality of holding the 2024 regional elections through the P2P program.

This study aims to analyze the Participatory Supervisory Education (P2P) program organized by Bawaslu Tasikmalaya City ahead of the 2024 Pilkada. This program aims to increase community participation in Pilkada supervision, by involving various groups such as students and community organizations. During the three-day intensive training, participants were equipped with knowledge and skills in supervision. This study uses the theory of political socialization and political participation, with a qualitative approach through interviews and documentation studies. Data were obtained from Bawaslu Province and Tasikmalaya City, P2P alumni, political parties, and the Tasikmalaya City community.

The results of the study indicate that the Participatory Supervisory Education (P2P) Program by Bawaslu Tasikmalaya City has increased participants' understanding of election supervision, but its implementation has not been fully effective. In general, participants understand the material and show better political awareness, but active involvement in supervision and reporting violations is still low. Where the main obstacle lies in the lack of post-training follow-up, so that the impact of the program is not sustainable.

Keywords: Political Education and Bawaslu